

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD 1 TRIRENGGO DAN SD KEPUHAN KABUPATEN BANTUL

## *THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION POLICIES IN 1 TRIRENGGO ELEMENTARY SCHOOLS AND KEPUHAN ELEMENTARY SCHOOLS BANTUL DISTRICT*

Oleh: Tri Kurnia Darmawanti, Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Prodi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, email: kurnia.cut3@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul, faktor pendukung dan penghambat serta cara mengatasi hambatan implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Tempat penelitian ini di Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul; SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan. Subyek penelitian ini adalah Kepala Seksi dan Staf Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar; Kepala Sekolah; guru kelas; guru pembimbing khusus dan orang tua siswa berkebutuhan khusus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari *Milles* dan *Hubberman*. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) SD 1 Trirenggo melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif melalui pengurus inklusif, pemenuhan sarana prasarana, pelatihan guru, kerjasama dengan pihak lain, adanya POT; sedangkan pelaksanaan di SD Kepuhan melalui pengurus inklusif, adanya sosialisasi, *assessment*, penanganan, kerjasama dengan pihak lain, pemenuhan sarana prasarana dan POT. 2) Faktor pendukung di SD 1 Trirenggo adalah kurikulum dimodifikasi; semua guru terlibat; mendata siswa dan meng-*assessment*; sarana prasarana sesuai kebutuhan siswa; penilaian sesuai kebutuhan siswa; kerjasama dengan pihak lain dan interaksi antar siswa baik. Faktor pendukung di SD Kepuhan yaitu kurikulum dimodifikasi; adanya pelatihan guru, kerjasama guru dan GPK; adanya *asesment*; adanya bantuan dana dan sarana prasarana; kerjasama dengan pihak lain dan sikap menghargai antarsiswa. Faktor penghambat di SD 1 Trirenggo yaitu guru kurang serius, sulit mendapat GPK; sarana prasarana kurang dimanfaatkan. Faktor penghambat di SD Kepuhan yaitu guru kurang optimal; peran sekolah dan orang tua kurang. 3) Cara mengatasi hambatan di SD 1 Trirenggo yaitu penggunaan dana seefektif; membangun kesadaran guru dan orang tua melibatkan guru dalam penelitian; kerjasama dengan pihak lain; mengajukan permohonan dana. Cara mengatasi hambatan di SD Kepuhan yaitu sekolah berkonsultasi dengan dinas; mengingatkan siswa belajar di rumah; adanya POT.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus

### **Abstract**

*This study aims to describe the implementation of inclusive education policies in SD 1 Trirenggo and SD Kepuhan Bantul District, the supporting factors and obstacles and ways overcome barriers to the implementation of inclusive education policies. This study used a qualitative approach and descriptive research. This study places in the Field Elementary School, Department of Basic Education Bantul District; SD 1 Trirenggo and SD Kepuhan Bantul District. The subject of this study is the section heads and staff of Elementary School, Departement of Basic Education Bantul District; headmaster; classroom teacher; Special guidance counselor and parents of students with special needs in SD 1 Trirenggo and SD Kepuhan Bantul Distric. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The study instrument used observation sheet, interview and documentation. Data were anayized using an interactive model of Milles and Hubberman. The validity of the data using triangulasi techniques and engineering resources. Study results show that: 1) SD 1 Trirenggo implementing inclusive education policies through inclusive board, meeting facilitie, teacher training, cooperation with other parties and the POT; while the implementation in SD Kepuhan through inclusive administrators, their socialization, assessment, response, coordination with other partie, the fulfillment of infrastructure and POT. 2) Supporting factor in SD 1 Trirenggo is a modified curriculum; all the teachers involved; student records and clicking assessment according to the needs of the students; cooperation with other parties and student*

*interaction is good. Supporting factors in SD Kepuhan is a modified curriculum; their teacher training; teacher and GPK collaboration, their assessment; funding and infrastructure, cooperation with other parties and respect between student. Inhibiting factor in SD 1 Trirenggo that the teacher is less serious; difficult to get GPK; underutilized infrastructure. SD Kepuhan inhibiting factor is teachers work effectively; the role of schools and parents are less. 3) The way overcome obstacles in SD 1 Trirenggo is as effective use of funds; build awareness of teachers and parents to involve teachers in study; cooperation with other parties; apply for funding. The way overcome obstacles in SD school Kepuhan is consult with agencies; remind students learn at home; the POT.*

*Keyword: policies implementation, inclusive education, childrent with specials needs*

## **PENDAHULUAN**

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan. Dalam bidang pendidikan, hak memperoleh pendidikan dapat digunakan manusia untuk mengembangkan potensi, minat dan bakat melalui ilmu pengetahuan dan wawasan yang telah diperoleh manusia sehingga manusia tersebut mempunyai bekal kehidupan yang lebih baik. Kesempatan memperoleh pendidikan tidak hanya untuk golongan tertentu, tetapi semua manusia termasuk anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Keberadaan anak berkebutuhan khusus sampai saat ini masih ada yang belum memperoleh hak untuk mengenyam pendidikan. Hal ini dikarenakan keterbatasan

akses menuju ke SLB, guru yang berkompeten menangani anak berkebutuhan khusus, sarana dan prasarana yang kurang memenuhi kebutuhan anak serta masyarakat seringkali justru mengucilkan anak berkebutuhan khusus. Cara yang tepat untuk menangani permasalahan yang dihadapi siswa berkebutuhan khusus dengan menyediakan sarana dan prasarana yang *accessible*. Sarana prasarana yang *accessible* dapat memudahkan anak untuk melakukan segala aktivitas terutama dalam bidang pendidikan. Salah satu pendidikan yang menyediakan sarana prasarana yang *accessible* adalah penyelenggaraan pendidikan khusus.

Pendidikan khusus yaitu pendidikan yang melayani siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan jenis ketunaannya. Penyelenggaraan pendidikan khusus tidak hanya dibutuhkan SLB tetapi juga sekolah umum, karena siswa berkebutuhan khusus banyak yang bersekolah di sekolah umum dan sekolah umum ada di hampir setiap daerah tempat tinggal. Penyelenggaraan pendidikan khusus di sekolah umum juga

menemui beberapa kendala yang dialami. Kendala yang dialami yaitu siswa berkebutuhan khusus kurang mendapat perhatian dan pelayanan yang sesuai, sekolah umum juga ada yang menolak untuk menerima anak didik baru yang berkebutuhan khusus. Padahal dinas pendidikan sudah menghimbau sekolah untuk menerima anak berkebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan pendapat Totok Sudarto dalam [republika.co.id](http://republika.co.id) eds. Kamis, 21 Maret 2013 yang berbunyi: “ Pada prinsipnya sekolah tidak boleh menolak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), sehingga setiap sekolah harus menyediakan pendidikan inklusi”.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY telah mendata sekolah yang memiliki siswa berkebutuhan khusus pada 2015 di Kabupaten Bantul terdapat 19 SLB dan 178 sekolah umum di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan 19 SLB dan 178 sekolah umum belum mampu menampung anak berkebutuhan khusus yang ada di hampir seluruh wilayah DIY. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kebijakan yang mendukung terlaksananya pendidikan untuk semua orang termasuk anak berkebutuhan khusus. Kebijakan adalah suatu aturan atau pedoman yang digunakan untuk mendasari pelaku kebijakan atau *user policy* dalam melaksanakan suatu program sehingga dapat mencapai tujuan dari program tersebut. Kebijakan menurut Hugh Hecllo (dalam Arif Rohman, 2012: 79) adalah “Cara bertindak

yang disengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Kebijakan juga diartikan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, dan instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan” (E. Anderson, dalam Arif Rohman, 2012:79).

Kebijakan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di DIY diwujudkan dengan adanya penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah umum. Kebijakan ini dicanangkan pada 12 November 2014 dan didasari adanya Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan anak pada umumnya. Pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini memerlukan guru pembimbing khusus dan kerjasama yang baik antar seluruh warga sekolah termasuk orang tua serta sekolah wajib memberikan sarana prasarana yang sesuai. Hal ini sesuai dengan isi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 41 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus”.

Kabupaten Bantul sebagai salah satu kabupaten di DIY juga mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2015 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Peraturan ini digunakan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Dalam pelaksanaan penyelenggaraannya, kebijakan pendidikan inklusif belum berjalan sesuai dengan harapannya. Beberapa kendala dialami dinas pendidikan dan sekolah khususnya jenjang SD seperti sekolah belum memiliki guru pembimbing khusus, Perancangan sekolah inklusif belum sepenuhnya membuat siswa mandiri karena fasilitas dan sarana prasana yang kurang mendukung. Kurikulum yang digunakan sebagian besar mengandalkan intensitas guru sekolah dalam membimbing siswa. Akibatnya siswa berkebutuhan khusus sering diperlakukan sama dengan siswa normal pada umumnya dalam hal penerimaan pembelajaran sehingga hasil belajar menjadi kurang optimal. Perlu adanya solusi yang tepat untuk meningkatkan pelayanan bagi siswa berkebutuhan khusus terutama berkaitan dengan pendidikan bagi semua guru agar mempunyai pengetahuan untuk menangani siswa berkebutuhan khusus.

Adanya 19 SLB dan 44 sekolah inklusif jenjang SD sampai dengan SMA/K Kabupaten Bantul diharapkan cara penanganan untuk menangani siswa berkebutuhan khusus semakin baik.

Harapannya melalui penelitian ini dapat diketahui tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul. Selain itu, peneliti dapat mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat serta cara yang digunakan untuk mengatasi hambatan yang muncul dari implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan oleh semua pihak terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul; SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul. Peneliti melakukan penelitian sejak tanggal 29 Juni sampai dengan 29 September 2016.

### **Subyek Penelitian**

Subyek dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Bidang SD dan Staf Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul; kepala sekolah; guru kelas; guru pembimbing khusus dan orang tua siswa berkebutuhan khusus.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri melalui pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Bogdan yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, data lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2015:334) . Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles and Huberman (Sugiyono, 2015:337) yang terdiri dari *data reduction, data display, and conclusion drawing/ verification*.

### **Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif**

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif yaitu penerapan dari peraturan yang telah dijadikan pedoman untuk

melaksanakan pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara. Pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif berkaitan dengan upaya yang dilakukan dinas pendidikan dan sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan siswa berkebutuhan khusus. Terdapat empat komponen yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakter agen pelaksana dan komunikasi (Van Meter dan Van Horn, dalam Arif Rohman, 2012: 108).

#### **a. Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul**

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif dipengaruhi oleh (1) standar dan tujuan kebijakan yaitu adanya pedoman berupa peraturan dan petunjuk pelaksanaan seperti peraturan perundang-undangan, peraturan gubernur dan peraturan bupati, pedoman pelaksanaan penggunaan dana subsidi. (2) sumber daya yaitu pemberian dana operasional, memberikan fasilitas dan guru pembimbing khusus untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Bantul. (3) karakter agen pelaksana yaitu bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY untuk memenuhi guru pembimbing khusus dan mengadakan pelatihan guru. (4) komunikasi yaitu berkoordinasi dengan kepala UPT, kepala sekolah serta penyampaian aspirasi tim staf kepada

pimpinan di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.

b. SD 1 Trirenggo

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif dipengaruhi oleh (1) standar dan tujuan kebijakan yaitu adanya kebijakan atau peraturan dari atas untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan, dapat belajar bersama dalam satu kelas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. (2) sumber daya yaitu sarana prasarana untuk mempermudah pembelajaran dan aktivitas siswa, adanya pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan menangani siswa, pendampingan belajar dan pelatihan keterampilan siswa, serta adanya dana subsidi khusus dari pemerintah. (3) karakter agen pelaksana yaitu memiliki kriteria khusus untuk menentukan guru pembimbing khusus, dan guru membuat RPP sampai mengevaluasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Orang tua siswa berperan aktif untuk mendukung kegiatan sekolah terutama pembelajaran di kelas. (4) komunikasi yaitu adanya pengurus pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif yang mencakup semua guru dan karyawan, orang tua siswa juga memiliki perwakilan untuk mengatur kegiatan pertemuan orang tua dengan sekolah. Komunikasi juga ditunjukkan melalui

kerjasama sekolah dengan pihak lain seperti dinas pendidikan, PLB UNY, konsultan sekolah dan lainnya.

c. SD Kepuhan

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif dipengaruhi oleh (1) standar dan tujuan kebijakan yaitu kebijakan berupa program dari pemerintah dan dinas pendidikan mengenai penanganan siswa berkebutuhan khusus, sehingga sekolah inklusif wajib menerima anak berkebutuhan khusus dengan berbagai jenis ketunaan dan dapat menangani siswa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. (2) sumber daya yaitu sumber daya finansial bantuan dari pemerintah, sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan pendidikan inklusif berupa buku latihan membaca siswa, kacamata, *braile* dan keterlibatan pendidik dan orang tua dalam pembimbingan siswa. (3) karakter agen pelaksana yaitu sekolah menentukan guru pembimbing khusus berdasarkan lulusan yang sesuai bidang PLB, mempunyai kesabaran dan pengalaman. Implementasi juga dilakukan melalui sosialisai yang dilaksanakan diawal semester, cara penanganan dengan penggunaan metode pembelajaran yang disesuaikan kebutuhan siswa, kerjasama sekolah dengan pihak lain serta orang tua untuk membimbing anak di rumah. (4) komunikasi yaitu adanya kerjasama

sekolah dengan pihak lain, sekolah melakukan komunikasi melalui pertemuan dengan orang tua dalam menangani permasalahan siswa berkebutuhan khusus. Komunikasi juga ditunjukkan melalui monitoring yang dilakukan dinas pendidikan dan kepala sekolah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif**

### **a. Faktor Pendukung**

- 1) Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul yaitu pertama, sarana prasarana berupa peraturan bupati, pemberian fasilitas bagi penyandang disabilitas, mendukung kebijakan pemerintah terkait wajib belajar 9 tahun.
2. Faktor pendukung SD 1 Trirenggo pertama, fleksibilitas kurikulum (bahan ajar) melalui kurikulum yang dimodifikasi sesuai jenis ketunaan dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, modifikasi dilakukan pada RPP dan silabus di setiap mata pelajaran. Kedua, tenaga pendidik yaitu melibatkan semua guru, tenaga kependidikan, orang tua, siswa dan dinas pendidikan dalam memberi penanganan untuk siswa berkebutuhan khusus. Sekolah juga mengadakan pelatihan guru bekerjasama dengan dinas

- pendidikan. Ketiga, input peserta didik berupa pendataan awal saat pendaftaran dan *assessment*, serta ada penanganan saat pembelajaran di kelas untuk mengembangkan potensi siswa. Keempat, sarana prasarana berupa membangun beberapa fasilitas fisik dan menyediakan buku-buku untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran serta ada dukungan dari pemerintah berupa dana untuk memenuhi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Kelima, evaluasi pembelajari yaitu mengadakan supervisi, rapat kenaikan kelas, diskusi antara pendidik dan tenaga kependidikan, serta adanya penilaian hasil belajar siswa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya. Keenam, lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yaitu adalaadanya pertemuan rutin pihak sekolah dengan orang tua siswa berkebutuhan khusus, kerjasama sekolah dengan pihak lain, interaksi dan kebiasaan penggunaan bahasa antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa normal di lingkungan sekolah, dan motivasi yang diberikan orang tua untuk keberhasilan anak.
3. Faktor pendukung SD Kepuhan pertama, fleksibilitas kurikulum yaitu sekolah membuat kurikulum sendiri sesuai kebutuhan dan kemampuan

siswa, mulai dari silabus sampai KKM. Sekolah juga memberikan kebebasan guru dalam menentukan metode dan inovasi pembelajaran yang digunakan guru. Selain itu, kurikulum juga membantu orang tua dalam membimbing anak. Kedua, tenaga pendidik yaitu adanya kerjasama guru kelas dan guru pembimbing khusus untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran siswa berkebutuhan khusus. Tenaga pendidik juga dilatih oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY untuk dapat menangani siswa berkebutuhan khusus dalam kelas. Ketiga, input peserta didik yaitu identifikasi dan *assessment* yang dilakukan di awal tahun ajaran. Setelah sekolah mengetahui jenis ketunaan, penanganan siswa berkebutuhan khusus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan serta potensi yang ada dalam diri anak. Keempat, sarana prasarana yaitu dana subsidi khusus dari Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, kacamata, *braile*, dan buku latihan membaca untuk siswa *slow learner*. Kelima, lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yaitu kerjasama yang terjalin antara pihak sekolah dengan Dinas Pendidikan Dasar mengenai pemenuhan kebutuhan dan

penanganan siswa berkebutuhan khusus di sekolah. Adanya perlakuan yang sama antar siswa dalam berinteraksi di lingkungan sekolah.

- 1) Faktor penghambat SD 1 Trirenggo pertama, tenaga pendidik yaitu guru kurang memiliki keseriusan dalam menangani siswa berkebutuhan khusus yang ada di sekolah. Sekolah juga kesulitan memperoleh guru pembimbing khusus yang berkompeten dan sesuai dengan bidang keilmuannya. Kedua, sarana prasarana yaitu sarana prasarana yang belum menunjang keinklusion siswa secara khusus dan pemanfaatan sarana prasarana mengandalkan guru pembimbing khusus.
- 2) Faktor penghambat SD Kepuhan pertama, tenaga pendidik yaitu guru kelas dan guru pembimbing khusus kurang optimal dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. Guru kelas juga mengalami kesulitan dalam memberikan pemahaman pada siswa normal tentang penanganan yang dilakukannya untuk siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas. Kedua, lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yaitu kurangnya peran sekolah dan partisipasi orang tua dalam memperhatikan dan menangani permasalahan anak berkebutuhan khusus di sekolah.

### 3. Cara Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

- 1) Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul yaitu 1) dinas mendata siswa berkebutuhan khusus yang ada di sekolah sehingga subsidi dana khusus benar-benar diberikan untuk sekolah inklusif. 2) Melatih guru umum untuk dapat menangani siswa berkebutuhan khusus. 3) Dinas memonitoring implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- 2) SD 1 Trirenggo yaitu 1) Menggunakan dana subsidi khusus inklusif dengan seefektif mungkin. 2) Membangun kesadaran guru dan orang tua untuk lebih memperhatikan siswa berkebutuhan khusus. 3) Melibatkan guru dalam penelitian untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar dalam kelas. 4) Adanya diklat/ pelatihan guru untuk menangani siswa berkebutuhan khusus. 5) Mengajukan proposal permohonan bantuan dana untuk memenuhi sarana prasarana.
- 3) SD Kepuhan yaitu 1) Sekolah berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dan menjalin kerjasama dengan pihak lain. 2) Pihak sekolah mengingatkan siswa untuk belajar di

rumah. 3) Sekolah melibatkan orang tua siswa berkebutuhan khusus melalui adanya POT (Paguyuban Orang Tua) dan orang tua melakukan pendampingan belajar anak di rumah.

### Simpulan dan Saran

#### Simpulan

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan sudah dilaksanakan. Kebijakan pendidikan inklusif dilaksanakan SD 1 Trirenggo melalui penetapan pengurus harian pelaksana pendidikan inklusif, pemenuhan sarana prasarana, adanya pelatihan guru, kerjasama sekolah dengan pihak lain, dan pertemuan rutin dengan orang tua. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Kepuhan dilaksanakan melalui pembentukan pengurus harian pendidikan inklusif, melakukan sosialisasi kepada orang tua, *assessment*, penanganan kepada siswa dan pertemuan rutin POT, kerjasama sekolah dengan dinas pendidikan dan pemenuhan sarana prasarana.

Faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo yaitu kurikulum dimodifikasi sesuai ketunaan dan kebutuhan siswa, pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif melibatkan semua guru dan tenaga kependidikan, sekolah mendata dan meng-*assessment* siswa saat pendaftaran, sarana prasarana sudah memenuhi kebutuhan, penilaian hasil belajar siswa disesuaikan

dengan kebutuhan siswa, sekolah menjalin kerjasama dengan orang tua dan terjalin interaksi yang baik antar siswa. Faktor pendukung di SD Kepuhan yaitu sekolah memodifikasi kurikulum sesuai kebutuhan siswa, adanya pelatihan dan kerjasama antara guru dengan guru pembimbing khusus, sekolah menangani siswa berdasarkan kebutuhan dan kemampuannya, adanya bantuan dana subsidi dan sarana prasarana sesuai kebutuhan siswa, sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain, sikap menghargai dan saling membantu antar siswa.

Faktor penghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo yaitu kurangnya keseriusan guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus dan sekolah kesulitan memperoleh guru pembimbing khusus; sarana prasarana belum menunjukkan keinklusian dan kurangnya pemanfaatan fasilitas sekolah. Faktor penghambat di SD Kepuhan yaitu guru kurang optimal melaksanakan kebijakan dan guru kesulitan memberi pemahaman kepada siswa; kurangnya peran sekolah dan partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Cara mengatasi hambatan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo yaitu sekolah menggunakan dana seefektif mungkin, membangun kesadaran guru dan orang tua untuk memperhatikan anak, kepala sekolah melibatkan guru dalam penelitian, sekolah mengadakan pelatihan guru melalui kerjasama dengan pihak lain,

sekolah mengajukan bantuan dana ke dinas pendidikan. Cara mengatasi hambatan di SD Kepuhan yaitu sekolah berkonsultasi dengan dinas dan menjalin kerjasama dengan pihak lain, sekolah mengingatkan siswa untuk belajar di rumah, sekolah mengadakan pertemuan dengan orang tua dan orang tua mendampingi belajar anak di rumah.

### **Saran**

1. Bagi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul memberikan dana subsidi khusus berdasarkan jumlah siswa berkebutuhan khusus. Meningkatkan pengawasan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
2. Bagi SD 1 Trirenggo kepala sekolah, guru kelas dan guru pembimbing khusus perlu meningkatkan penanganan siswa berkebutuhan khusus dan meningkatkan pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia di sekolah.
3. Bagi SD Kepuhan kepala sekolah, guru dan orang tua perlu meningkatkan kesadaran dan perannya dalam pendidikan anak dan perlu meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan pihak lain dalam menangani siswa berkebutuhan khusus.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Arif Rohman. 2012. *Kebijakan Pendidikan, Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Totok Sudarto. 2013. *Bantul Siap Tampung ABK di Sekolah Umum*. Republika Online: Diakses pada tanggal 04 Maret 2016 pukul 14: 44 WIB dari <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/13/03/21/mjzs4i-bantul-siap-tampung-abk-di-sekolah-umum>

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas